

Kuliah Umum
Dr. (Hc) Arifin Panigoro

MELAWAN LUPA

28 Maret 2012

Program Pascasarjana - Program Studi Kajian Wilayah Amerika
Gedung IASTH Lantai 3 Universitas Indonesia - Salemba

MELAWAN LUPA:

Perjalanan Merajut “Tenun” ke-Indonesia-an Masa Kini

Dr. (Hc) Arifin Panigoro

Disampaikan dalam Kuliah Umum di Program Pascasarjana - Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, 28 Maret 2012.

PENGANTAR

Indonesia, sebagai sebuah bangsa (*nation state*), bukan konsep yang lahir begitu saja. Negara yang memiliki garis pantai ribuan kilometer, sekian ratus etnis, lebih dari 17 ribu pulau, dan terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke memiliki cerita panjang yang layak, dan patut dipahami dari tiap generasi ke generasi berikutnya. Cerita Indonesia, di mata saya, tidak lebih dari sebuah “tenun” emas yang koyak, bahkan terlupakan oleh anak negerinya.

Lupa? Ya, benar, lupa ! Terminologi yang cenderung *cynical* ini, dengan memohon maaf, saya gunakan untuk menggambarkan suasana kebatinan dan respon umum masyarakat terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dari hari ke hari menggugah keprihatinan kita bersama.

Dalam lembar berikutnya dari *paper* sederhana ini, Anda bisa mengikuti postulat lupa yang coba saya jadikan argumen dan menempatkannya dalam bingkai ke-Indonesia-an yang mestinya bisa kita bangun bersama, dan melahirkan rasa bangga sebagai

anak negeri baik untuk masa kini, dan Insya Allah, kelak dalam diskursus tentang negara bangsa kita di masa yang akan datang.

Berita-berita Baik

Coba ambil berita *headline* dari koran nasional, nyalakan pesawat TV, simak isi *social media* seperti *twitter* dan juga *facebook*! Berapa persen Anda berani bertaruh berapa besar porsi berita-berita bagus untuk Republik yang kita cintai? Jika dari kepala berita yang ada, tentu saja, kita tidak usah kaget betapa carut-marutnya negeri kita dari sisi penegakan hukum, pat-gulipat wakil rakyat, hingga bencana alam yang tak berkesudahan.

Tapi, percayalah, Indonesia lebih dari sekadar yang termaktub dalam kepala berita di berbagai media massa tersebut. Di sini saya hendak *sharing* cerita positif soal negeri yang kita banggakan. Tidak usah merujuk pada berbagai survey atau praktek konsultan pencitraan. Namun saya akan menukik pada satu sudut pandang yang lebih mudah untuk ditemukan alat ukur atau parameternya, baik secara ilmiah, atau pun dari pandangan mata awam sekali pun.

Mari kita melongok ke sektor ekonomi Indonesia. Mengapa? Suka atau tidak, *believe it or not*, berbeda dengan *tone and manner* dari sebagian besar kepala berita di atas, sejatinya Indonesia berada pada pertumbuhan ekonomi yang membuat decak kagum negara-negara maju. Betapa tidak? Bayangkan saja, dalam situasi ekonomi global yang *chaotic*, bersumber dari krisis di Amerika Serikat tahun 2008 silam, dan kini berulang di Eropa, ternyata Indonesia membukukan rekor pertumbuhan ekonomi. Dalam

sebuah publikasi majalah terkemuka *the Economist* bahkan menyebutkan sejak tahun 2009 Indonesia menunjukkan tanda-tanda meraih peluang emas dalam pertumbuhan ekonomi yang mencetak angka di atas 6 persen per tahunnya.

Untuk diingat bersama, dalam situasi ekonomi global yang terpuruk, selain Indonesia hanya India dan Cina yang mengukir prestasi serupa dalam pertumbuhan ekonominya. Tak heran jika mulai ada yang menyebut Indonesia sebenarnya layak masuk dalam kategori BRIIC (Brazil, Rusia, India, Indonesia, Cina) sebagai kelompok negara dengan ketahanan ekonomi (*economic resilience*) yang membuat mereka kalis dari krisis. Prestasi inilah yang mengantarkan Indonesia kini dalam deretan negara-negara G20 yang total kontribusinya mencapai 80 persen GDP dunia.

Lalu, pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama, bagaimana negara kita ini bisa *survive*? Dari krisis global yang pernah membuat kita terpuruk pada medio 1997 silam, dan apa resepnya untuk kebal dari krisis pada medio 2008? Indonesia bukan negara pesulap yang dalam sekejap mampu menghadirkan ilusi perubahan ekonomi di panggung hiburan.

Kemampuan negara kita keluar dari krisis pada 1997 silam dan bangkit sebagai cikal bakal 'macan ekonomi Asia' setelah krisis 2008 inilah yang perlu dijadikan pelajaran bersama bagi kita semua. *Moral story*-nya adalah ternyata "kita bisa". Dalam hemat saya, ke-bisa-an ini bukan ilmu sulap tadi, tapi merupakan buah dari transformasi politik yang terjadi di dalam negeri. Dari rejim yang serba otoritarian ke pemerintahan yang serba demokratik.

Pemilihan umum presiden secara langsung, dan kepala-kepala daerah, secara agregat umum menunjukkan fase tumbuhnya kedewasaan politik di rakyat kita. Memang muncul gejolak-gejolak dalam berbagai pilkada, tapi secara keseluruhan prestasi sebagai penyelenggara salah satu “pesta demokrasi” terbesar di muka bumi patut kita syukuri.

Lebih dari itu, di sisi lain kita mencatat mulai bergulirnya pendulum dari sistem pemerintahan yang terpusat, sangat “Jakarta-minded”, menjadi desentralisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional di pelosok nusantara. Kekuatan ekonomi regional ini yang melahirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di tanah air. Anda akan sulit membayangkan Makassar memiliki bandara internasional semegah sekarang, atau bagaimana ceritanya kawasan Timur Indonesia bersolek diri membuka kran *foreign direct investment* di sektor pengolahan sumber daya alam dengan memangkas mata rantai birokrasi. Di masa silam tentu hal-hal ini adalah musykil untuk tidak mengatakan mustahil terjadi.

Pisau analisis kita juga mesti dipertajam dalam melihat pertautan ekonomi dan politik di atas. Mengapa demikian? Sejatinya, di balik pertumbuhan ekonomi regional tersebut, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pula pada KONSUMSI DOMESTIK yang begitu besar. Tidak kurang dari 240 juta populasi yang menciptakan tumbuhnya pasar domestik yang begitu menggiurkan bagi segala lapisan produsen atau pelaku ekonomi di tanah air atau manca negara untuk menikmati legitnya kue konsumsi domestik tersebut.

Tempo hari saya dengar seorang teman berseloroh populasi Jabodetabek saja mencapai bilangan 28 juta-an. Saya tertegun, apa benar demikian? Bukan pada besaran angkanya, tapi jika memang data ini sah artinya di kawasan sekitar ibukota republik ini kita memiliki pasar domestik yang besarnya melebihi gabungan penduduk se-Malaysia dan Singapura, atau setara dengan Australia yang sebesar itu benuanya.

Sekadar menambahkan sederet fakta lain yang menarik untuk dijadikan diskusi di antara kita. Beberapa analis pernah mengulas maraknya *culture pop* atau budaya pop dengan segala hiruk pikuk kehebohan dan *packaging*-nya. Hal ini mencakup pertumbuhan pola konsumsi yang di atas kebutuhan primer, dan mulai mencuatnya lapis masyarakat yang bergaya hidup di atas “cukup”. Patokan ini memang perlu kajian lebih dalam, tapi tempo hari sebuah majalah berita terkemuka, menurunkan laporan utama munculnya masyarakat lapis baru ini dengan menghitung maraknya konsumsi jam tangan, tas dan mobil mewah, hingga tiket pertunjukan musik dan hiburan yang berkelas dunia di Indonesia ludes. Saya bukan pengamat budaya pop, tapi postulasi konsumsi ini perlu kita uji dan perdalam, bukan cuma dengan melihat laris manisnya penjualan *blackberry*, *smart-phone*, komputer tablet, hingga mobil seri terbaru yang *launching*-nya pun di Jakarta. Yang perlu dilihat, dan ini menjadi pertanyaan besar saya, dan saya harap Anda semua, apakah kita hanya berhenti selaku NEGERI KONSUMEN?

Bicara penggunaan *smart-phone*, barangkali, boleh dibilang Indonesia menempati posisi istimewa di mata para produsennya.

Peluncuran produk baru *blackberry* pun dilakukan di Jakarta. Lebih dari dua ribu orang antre, bahkan sampai ada yang cidera, dan si empunya hajjat acara turut digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggung-jawabkan kegiatan tersebut. Cerita serupa saya dengar dari pengguna Nokia, dan kini anak-anak muda kita sedang tergila-gila dengan komputer tablet entah itu iPad atau produk-produk sejenisnya.

Yang perlu digarisbawahi dari fenomena di atas adalah kuatnya daya beli konsumen kita. Bahkan dalam hitungan bulan, begitu muncul produk baru, maka *gadget* lama pun ditinggalkan. Tak heran bila di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia saya ikuti pemberitaan maraknya pasar *gadget* bekas. Yang melahirkan lapisan berikutnya dari kalangan masyarakat kita untuk mengonsumsi berbagai perangkat canggih tersebut dengan harga lebih terjangkau kantong mereka.

Maraknya penggunaan telepon genggam ini juga melahirkan inovasi dari sisi layanan produk *provider*-nya. Salah satu yang mencengangkan adalah lahirnya layanan pra-bayar. Bahkan saya dengar, ya di Indonesia pula, layanan pra-bayar *blackberry* pertama kali bermula. Apa benar demikian? Jika mungkin ada yang memiliki komparasi data pasar *blackberry* silakan dikomentari.

Berbagai cerita perihal ketahanan ekonomi, proses pendewasaan politik, dan menguatnya lapisan baru konsumen di masyarakat perlu disyukuri sekaligus dicermati. Jangan membuat kita lengah dan cenderung mengabaikan faktor-faktor lain yang menjadi

prasyarat munculnya *sustainability growth* dari perekonomian kita. Yang mensyaratkan pula inovasi-inovasi yang lebih cerdas dan kreatif dalam pendayagunaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, de-birokratisasi, pengetatan pengawasan penggunaan keuangan negara, bahkan kalau perlu kita bisa mengusulkan adanya *quantum leap* berupa layanan *broadband internet* berkapasitas raksasa dengan harga murah untuk mendorong munculnya ekonomi kreatif dari generasi muda kita.

Tanpa sejumlah ide-ide besar di atas, maka, niscaya tren positif yang kita nikmati ini hanya akan berakhir di kepala berita media massa. Hanya menjadi penghias lembar demi lembar prospektus perusahaan yang ingin masuk ke pasar modal. Dan hanya menempatkan Indonesia, sekali lagi, sebagai negara konsumen.

Berita-berita yang Tidak Menggembirakan.

Pertanyaan terakhir, soal jati diri sebagai negeri konsumen, sungguh menggelitik dan barangkali tidak akan selesai dalam rentang diskusi yang ada di ruang kuliah di kampus yang kita banggakan ini. Mengapa? Pertanyaan ini pula yang membuat saya mesti memiliki *balanced opinion* terkait berbagai kabar positif yang ada di Indonesia. Bahkan pertanyaan ini pula yang, niscaya, perlu terus menerus kita gaungkan, agar kita tidak cepat “lupa diri” dan tetap bersemangat membangun republik ini secara utuh. Secara berkesinambungan, dan tidak hanya berhenti pada dataran pengguna atau perilaku konsumtif belaka.

Telunjuk saya tertuju pada sektor pangan. Mengapa demikian? Hingga hari ini jargon *gemah ripah loh jinawi* yang kerap

berdengung di benak kita di masa lalu hanya tinggal jargon belaka. Negara kita yang memiliki tingkat kesuburan tanah begitu tinggi, yang memiliki curah hujan bagus, dan jutaan hektar lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan ternyata masih getol impor sebagian dari komoditas pokok pangannya untuk mengisi perut dari ratusan juta warganya.

Ironis? *Well*, barangkali itu memang fakta yang tidak bisa kita pisahkan begitu saja dalam menyoroti ketahanan pangan Indonesia. Sejak lima tahun berselang sinyalemen akan bahaya krisis pangan ini sudah kerap menghiasi diskursus kebijakan publik di tanah air. Bahkan seorang pejabat tinggi di departemen pertanian pernah melansir pada 2017 jika tidak ada perubahan signifikan maka Indonesia akan hidup dari impor pangan untuk mencukupi kebutuhan perut warganya.

Sayangnya, hal-hal semacam sinyalemen peringatan ini lebih mengemuka pada fase-fase pancaroba atau pergantian musim. Jadi berita yang mengemuka di berbagai media massa jika ada kemarau panjang, atau banjir besar yang merusak lahan subur di tanah air. Atau jika ada berita terbongkarnya penyelundupan bahan pangan.

Tapi apakah kita ada ketekunan untuk mencetak lahan pertanian baru? Adakah kita memberikan fasilitas cukup bagi investor atau pengembang yang membuka lahan baru di daerah terpencil? Atau di lahan kritis yang konon jumlahnya mencapai hingga 70 juta hektar lahan kritis di pelosok tanah air.

Di mata saya ini adalah bagian dari politik keberpihakan atau lazim disebut juga *affirmative action* dari pemangku kepentingan di penyelenggara negara. Mengapa tidak? Ketegasan sikap dan kebijakan ini diperlukan, dan hal ini serius bukan ancaman main-main yang cuma berhenti jadi kepala berita di media massa. Coba dicek lebih lanjut data sebagai berikut: pertumbuhan penduduk mencapai 1,5% per tahun di Indonesia; jika laju pertumbuhan populasi ini tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan produksi dalam negeri, maka ancaman krisis pangan yang semula menjadi bahaya latent akan menjadi musuh bersama di dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain desakan akan besarnya pemenuhan komoditas berbagai macam barang konsumsi, mendorong tingginya konversi lahan pertanian untuk kawasan industri atau perumahan.

Sinyalemen bahaya ini pernah beberapa kali saya sampaikan di berbagai kampus. Di antara rujukan yang ada, pernah saya kutip data USDA (*US Departement of Agriculture*) *Baseline Projection* yang mengidentifikasi akan makin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap dunia luar dalam bidang pangan. Dalam hal kebutuhan beras misalnya, kalau tidak ada perubahan yang signifikan, pada tahun 2014 Indonesia diperkirakan akan mengimpor beras 2,4 juta metrik ton, hampir 2,5 kali dari importnya tahun 2004. Peningkatan import juga diperkirakan akan terjadi pada kedelai dan gandum. Diperkirakan pada tahun 2014 Indonesia akan mengimpor 2.0 juta metrik ton kedelai (1,5 kali impor tahun 2004) dan mengimpor gandum 5,3 juta metrik ton (1,2 kali import tahun 2004).

Untuk lebih menggaris bawahi makin tergantungnya Indonesia terhadap impor bahan pangan, Indonesia sekarang ini bahkan mengimpor garam dan ikan. Sungguh merupakan suatu ironi bahwa suatu negara kepulauan dengan laut yang sangat luas dan sebagai salah satu negara dengan pantai terpanjang di dunia harus mengimpor ikan dan garam untuk konsumsi dalam negeri. Tidak perlu mencari argumentasi untuk menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam yang melimpah dari bangsa ini sungguh memprihatinkan.

Potret buram krisis pangan sebetulnya sudah lama diingatkan oleh pemangku kepentingan. Tak kurang dari DPR sendiri tengah mempersiapkan RUU pangan sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1996. Tempo hari sebuah harian nasional memuat tulisan tentang keterkaitan produk perundang-undangan ini dengan potensi krisis pangan yang dialami Indonesia. Argumentasi yang menarik dari Arif Satria (Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Dekan FEMA IPB) dalam tulisan itu ia menyoroti fakta bahwa krisis pangan sebenarnya terkait dengan krisis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang produksi pangan. Ia tunjukkan data Badan Pusat Statistik (Tahun 2006) 77% petani hanya tamatan Sekolah Dasar. Pertumbuhan jumlah generasi muda yang ingin menjadi petani dan nelayan juga menurun.

Tak kalah pahitnya adalah kabar dari sektor energi. Indonesia kini tak lagi menjadi anggota OPEC, karena lebih tepatnya kini Indonesia menjadi pengimpor minyak bumi. Padahal sumber daya energi di alam kita sungguh berlimpah ruah. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya energi yang melimpah dan

beragam baik yang bersumber dari fosil seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam, maupun sumber energi yang terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, geothermal, bahan bakar nabati (*biofuel*), biomassa, hingga tenaga gelombang/ombak. Meskipun potensi sumber energi melimpah, Indonesia sampai saat ini tetap belum bisa memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya sendiri.

Sementara sumber energi yang berasal dari fosil dieksploitasi habis-habisan, sumber-sumber energi yang terbarukan tidak banyak dapat perhatian. Tenaga angin dan tenaga surya praktis belum termanfaatkan.

Cerita tak kalah pilunya datang dari kerusakan lingkungan akibat pengembangan sektor industri dan perkebunan yang mengabaikan keseimbangan alam. Indonesia karena luasan lahan gambut yang begitu besar, dan tidak terkendali dari sisi pemanfaatannya, menyebabkan terjadinya pelepasan emisi karbon besar-besaran. Sehingga Indonesia pun muncul sebagai salah satu negara penghasil karbon terbesar di dunia.

Di sektor sumber daya manusia juga setali tiga uang ceritanya. Kendati jamak terdengar adanya prestasi sejumlah anak muda Indonesia di level dunia, tapi data secara umum menunjukkan *Human Development Index (HDI)* Indonesia hingga data tahun 2011 berada di peringkat 124 dari 187 negara. Bahkan posisi kita ini pun jauh tertinggal dibandingkan tetangga serumpun.

Fenomena lain yang tak kalah mirisnya adalah tingginya praktek korupsi di penyelenggara negara. Rasanya tidak akan cukup waktu yang ada dalam ruang diskusi ini untuk mengupas tuntas maraknya pencolengan uang negara oleh para pejabat atau wakil rakyat. Hampir tiap hari isi koran dan media elektronik penuh dengan ekspose tindak korupsi. Bahkan seolah-olah palu hakim dan jerat jeruji besi pun seolah tidak cukup untuk menghentikan perbuatan tidak terpuji ini di berbagai penjuru tanah air.

LUPA

Lupa Pengorbanan Para Pejuang Kemerdekaan

Deretan cerita positif tentang Indonesia seolah-olah setetes air di tengah lautan prahara. Tak berbekas. Persis seperti metafora yang menggambarkan rusak susu sebelangga karena nila setitik. Di sinilah dalam forum yang terhormat ini saya mencoba untuk mengajak para peserta kuliah mendiskusikannya. Dengarkan suara hati anda, simak baik-baik, dan coba cerna dengan hati-hati, sesungguhnya apa yang berlangsung di republik yang kita cintai?

Saya mencoba mengemasnya dalam judul *paper* sederhana ini, "Melawan Lupa: Perjalanan Merajut 'Tenun' ke-Indonesia-an Masa Kini." Penyakit dan bahaya lupa inilah yang menjadi biang keladi dari begitu beratnya beban anak negeri kita.

Lupa yang pertama, kembali pada terlupakannya spirit dari para perintis kemerdekaan. Banyak di antara kita yang lupa bahwa Indonesia bisa memproklamkan kemerdekaan karena dalam perjuangan merebut kemerdekaan sangat banyak orang yang

bersedia memberi. Mereka tidak hanya memberi secara tulus materi yang mereka miliki, namun mereka bahkan rela mengorbankan jiwa mereka. Apabila bukan karena pengorbanan mereka, kita semua tidak akan duduk di sini bersama-sama, dengan tenang dan damai.

Anda bisa bayangkan di saat tingkat buta huruf begitu tinggi di tanah air, di saat media massa dan komunikasi publik masih berlangsung secara tradisional, dan di saat begitu besarnya dilematika yang dihadapi antara menjadi bangsa yang berdaulat atau berkompromi dengan penjajah, tapi para pemimpin dan rakyat Indonesia bersatu padu. Berbulat tekad. Ibarat merajut tenun maka jalinan semangat dari satu orang ke yang lainnya, dari satu kubu perlawanan ke tempat lainnya, dari satu kota ke daerah lainnya, terus menggelora menjadi sebuah rajutan tenun ke-bangsa-an, tenun ke-Indonesia-an, yang terajut mempertautkan ratusan etnik suku bangsa yang berbeda-beda menjadi satu bangsa berdaulat: Indonesia.

Sayangnya, banyak diantara kita sekarang yang berperilaku sebaliknya; bukan memberi dan berkorban bagi kemajuan bangsa dan negara tetapi mencuri kekayaan negara dengan melakukan korupsi. Dengan melakukan korupsi, seseorang tidak hanya mengabaikan pengorbanan para pejuang kemerdekaan, tetapi mengkhianati semangat perjuangan mereka.

Di masa perang kemerdekaan yang kita hadapi adalah penjajah. Di masa Indonesia modern kini, yang menjadi "musuh" adalah sikap serakah, sikap lupa pada akar spirit bangsa, sikap yang

justru menyuburkan tindak terpuji yang mengoyak-ngoyak tenun ke-Indonesia-an. Merobek jalinan kebangsaan di antara kita.

Lupa Pentingnya Karakter

Di samping pengorbanan dari para pejuang kemerdekaan, keberhasilan merebut kemerdekaan juga disebabkan oleh keberhasilan para bapak bangsa dalam membangun dan menguatkan karakter bangsa. Mereka berhasil membangun kepercayaan diri bangsa, semangat persatuan, keberanian, semangat berkontribusi dan komitmen untuk mencapai cita-cita bersama.

Sayangnya, ketika Indonesia berusaha membangun perekonomian sesudah kemerdekaan, kita lupa bahwa ketersediaan dana yang dipinjam dari luar negeri tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat luas apabila tidak disertai dengan karakter yang kuat. Dana yang melimpah di tangan orang-orang yang tanpa karakter justru menimbulkan masalah besar, termasuk di dalamnya memicu tumbuhnya kebiasaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, tanpa karakter yang kuat, Indonesia dengan cepat terperangkap dalam kebiasaan menadahkan tangan kepada orang lain, bukan membangun berdasarkan kekuatan sendiri.

Persoalan membangun karakter ini juga yang mendasari cara kerja para pelaku bisnis. Mereka mudah tergiur untuk dapat keuntungan instan. Serba cepat dan mudah. Gelora untuk memperjuangkan mutu kerja dan kualitas dari proyek yang mereka tangani, terkikis habis oleh nafsu serakah yang menggerogoti

karakter mereka. Akibatnya rakyat pun menanggung beban berupa *mark up* atau *transfer pricing* yang merugikan keuangan negara.

Di titik ini saya ingin menyitir pesan bijak para pendahulu kita di republik. Berbisnis boleh saja, mencari untung adalah sebuah keniscayaan. Tapi berbisnis yang disertai dengan ikhtiar membangun karakter! Karakter yang menguatkan tenun kebangsaan tadi. Pebisnis tidak hanya tergerak untuk mencari untung setinggi-tingginya. Namun dalam perilaku sehari-hari juga mesti mengedepankan semangat keterbukaan, transparansi, akuntabel, dan berbagi kepada masyarakatnya.

Sudah lebih dari cukup contoh praktek bisnis yang buruk di tanah air. Yang berakhir di balik jeruji atau menyebabkan kerugian besar di masyarakat. Praktek serupa juga muncul bahkan di negeri kampiun demokrasi dan konon disebut-sebut sebagai lokomotif kapitalis dunia: Amerika Serikat. Lihat saja tragedi Worldcom, Enron, Madoff, hingga ambruknya raksasa bisnis Goldman Sachs. Akar dari ambruknya para jawara ini tidak lain adalah ketiadaan karakter yang kuat dalam berbisnis untuk kebaikan bersama. Bukan sekadar mengeruk keuntungan untuk kantong sendiri!

Lupa Menjaga Kedaulatan

Dalam sebuah pidatonya Presiden Soekarno menyatakan, bahwa bangsa-bangsa yang baru mencapai kemerdekaan, yang termasuk dalam kekuatan dunia yang baru muncul, harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bangsa-bangsa yang

benar-benar berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam era globalisasi sekarang ini memang tidak ada negara yang benar-benar mandiri yang tidak terkait dengan perekonomian global. Namun demikian, pesan utama dari pidato tersebut adalah: kalau suatu bangsa ingin benar-benar berdaulat, bangsa tersebut tidak boleh bergantung pada pihak luar, tidak boleh kehilangan jati dirinya. Ketika kita lupa pada pesan tersebut, secara perlahan-lahan kita makin tergantung pada bangsa lain, seperti ketergantungan kita sekarang dalam bidang energi dan pangan. Dalam dua hal ini kedaulatan kita sudah berkurang. Ketergantungan ini akan membuat Indonesia makin rentan terhadap tekanan bangsa lain, termasuk tekanan dalam bidang politik.

Lupa Menghayati Kebhinekaan

Kita mengetahui bahwa negara kita terdiri lebih dari sepuluh ribu pulau dan sangat luas. Negeri kita ini, tidak hanya masyarakatnya sangat bhineka, namun juga kondisi fisik geografinya. Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya dan secara umum tanahnya relatif sangat subur; 58% penduduk Indonesia tinggal di Jawa yang luasnya hanya 6,9% luas Indonesia - tingkat kepadatan penduduk di Jawa adalah 1.042 jiwa per kilometer persegi. Di pihak lain, Papua yang tanahnya tidak subur pulau Jawa, luasnya 21,6% dari luas Indonesia dengan penduduk 1,5 % dari penduduk Indonesia, dengan kepadatan 9 jiwa per kilometer persegi; Kalimantan, luasnya 30% dari luas Indonesia dihuni oleh

5,1% penduduk Indonesia — dengan kepadatan 24 jiwa per kilometer persegi.

Namun demikian, dalam merumuskan kebijakan pembangunan, nampaknya kebhinekaan Indonesia ini sering diabaikan. Banyak kebijakan yang dibuat di pusat berdasarkan pada anggapan seolah-olah Indonesia ini semuanya seperti pulau Jawa atau bahkan seperti Jabotabek. Kebijakan yang mengacu pada daerah yang padat penduduk, dengan tanah yang subur, dianggap dengan sendirinya berlaku bagi daerah yang tanahnya luas, tidak subur serta dengan penduduk yang sangat jarang, serta dengan tradisi yang berbeda pula.

Lupa Peran Kecerdasan.

Indonesia dianugerahi sumber daya alam. Namun sumber daya alam yang ada tidak dengan sendirinya menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Agar sumber daya alam menjadi berkah, masyarakat hendaknya memiliki kecerdasan untuk mengolahnya secara kreatif dan bertanggung jawab. Tanpa kecerdasan, masyarakat hanya akan menjadi penonton dalam eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak lain. Yang menikmati hasil eksploitasi adalah orang lain, bukan masyarakat di sekitarnya.

Sejarah telah mengajarkan masyarakat Indonesia bahwa kekayaan bumi Indonesia, khususnya rempah-rempah dari Maluku, telah menjadi daya tarik masuknya kekuatan asing ke Indonesia pada abad ke 16 dan menjadi awal dari era kolonialisme di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam namun tanpa

kecerdasan dan kekuatan karakter akan membuat suatu negara rentan terhadap "serbuan" bangsa lain. Serbuan ini bentuknya bermacam-macam; serbuan ini bisa bersifat halus, yaitu infiltrasi dalam perumusan kebijakan dan manipulasi mindset atau pola pikir, atau serbuan fisik. Untuk menangkal serbuan inilah Indonesia mutlak memerlukan program perbaikan mutu dan tingkat pendidikan yang merata bagi semua. Apabila perbaikan mutu, tingkat dan pemerataan pendidikan ini tidak dilakukan, maka sekitar 240 juta rakyat Indonesia tidak akan berubah menjadi kekuatan bangsa, namun menjadi beban.

Lupa Tanggung Jawab Sosial.

Suatu masyarakat atau suatu bangsa hanya akan bisa berkembang secara berkelanjutan apabila warganya menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial ini, warga masyarakat berusaha sebaik mungkin berkontribusi bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan dengan tetap menjaga kemajuannya sebagai individu. Tanggung jawab sosial ini dilakukan berdasarkan kesadaran bahwa kemajuan individu dan kemajuan masyarakat, apabila ingin berkelanjutan, haruslah berjalan bersamaan; kemajuan dan perkembangan yang berkelanjutan tidak akan terjadi apabila kemajuan atau perkembangan individu dilakukan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Korupsi dan perusakan lingkungan yang masih terus berlangsung di Indonesia sekarang ini adalah manifestasi nyata dari tipisnya atau bahkan hilangnya rasa tanggung jawab sosial. Tanpa rasa tanggung jawab sosial, seorang warga negara, apakah dia bagian

dari lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat bisnis, atau organisasi kemasyarakatan, akan mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Suatu negara berpotensi menjadi negara gagal apabila sebagian terbesar warga negaranya mencari berbagai cara untuk menggerogoti kepentingan negara, bangsa dan kepentingan umum, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tanpa rasa tanggung jawab sosial, seseorang akan mengabaikan etika dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak peduli apakah dia pegawai negeri, karyawan swasta, pemilik perusahaan, eksekutif perusahaan, anggota masyarakat biasa atau tokoh masyarakat.

Hentikan, hancurkan sikap lupa! Lawan! Jangan biarkan tenun indah ke-Indonesia-an kita koyak oleh sikap lupa kita.

MELAWAN LUPA

Bagaimana caranya kita keluar dari jebakan lupa? Berikut ini saya sampaikan enam langkah untuk memerangi lupa (sebut saja langkah 6B). Tidak ada teori di belakang langkah-langkah ini. Namun demikian hal ini saya sampaikan di sini karena langkah-langkah tersebut sudah saya coba terapkan dalam kegiatan-kegiatan saya, baik pada waktu membangun dan mengembangkan perusahaan maupun dalam menjadi penggiat pada beberapa organisasi kemasyarakatan.

Berpikir

Dalam upaya untuk mencapai Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, damai dan sejahtera serta menempatkan diri sebagai bangsa yang bermartabat di dunia, kini Indonesia memang masih

menghadapi berbagai permasalahan atau tantangan di berbagai bidang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kreativitas tinggi. Diperlukan gagasan-gagasan baru atau segar agar bangsa ini bisa mengatasi tantangan secara cerdas.

Gagasan baru ini mencakup upaya menemukan dan memunculkan potensi alam dan potensi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih terpendam. Di samping itu perlu dicari cara-cara baru agar kemajuan dan kesejahteraan yang tercipta bisa dirasakan secara lebih merata oleh rakyat Indonesia. Dalam mencari cara-cara baru ini, kita hendaknya tetap meyakini kearifan dari kata bijak "di mana ada kemauan di sana ada jalan".

Dalam kaitannya dengan hal ini Medco Group dan beberapa organisasi sosial di mana saya terlibat telah mengembangkan berbagai gagasan dalam rangka ikut memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa kita, khususnya permasalahan atau tantangan dalam bidang pangan, energi, dan lingkungan hidup.

Dalam bidang energi misalnya, saya berpendapat bahwa di samping melakukan konservasi atau penghematan, bagi Indonesia, sekarang ini ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Secara moral, sangatlah tidak bertanggung jawab apabila suatu saat nanti sumber-sumber energi yang tak terbarukan di Indonesia sudah habis dan Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya dari sumber energi terbarukan yang melimpah di Indonesia. Sebagai bagian dari tanggung jawab generasi sekarang kepada generasi yang akan datang Indonesia

perlu segera masuk dalam gerakan besar mengembangkan sumber energi terbarukan ini.

Dalam industri gas dan minyak bumi, walaupun cadangan minyak bumi Indonesia akan habis, kita akan tetap bisa memperoleh manfaat dari industri minyak ini, yaitu melalui penyediaan jasa tenaga ahli dan teknisi dibidang perminyakan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yang akan datang dunia perminyakan akan sangat aktif mencari dan mengembangkan lapangan baru. Akan diperlukan puluhan ribu tenaga kerja perminyakan. Lapangan minyak yang besar-besar di Timur tengah dan Afrika memerlukan banyak tenaga kerja, dan mereka tidak bisa memenuhi dengan tenaga kerja lokal. Kita bisa memenuhi kekurangan tersebut. Memang ada saingan dari negara lain seperti Jepang dan China. Medco telah menugaskan orang-orangnya untuk bekerja di Iran, Oman, Libya, dan mereka bekerja dengan tenaga kerja dan perusahaan yang menerapkan standard dunia. Ternyata tenaga kerja kita di sana tidak kalah dari tenaga kerja dari negara-negara lain baik dari Asia, Eropa maupun Amerika. Dengan demikian, di masa depan kekayaan utama perusahaan minyak Indonesia adalah modal insani (*human capital*) yang berdaya saing international, yang siap berkarya di seluruh dunia. Untuk itu, pendidikan di Indonesia dituntut untuk melakukan berbagai inovasi agar bisa menghasilkan lulusan yang punya kompetensi dan etos kerja berstandar internasional dan dalam jumlah besar pula. Mutu pendidikan inilah yang mentransformasikan ratusan juta penduduk Indonesia menjadi lokomotif penggerak kemajuan, sebagai sumber kesejahteraan, bukan sebagai beban.

Dalam bidang pangan, agar bisa keluar dari resiko ketergantungan yang makin lama makin besar terhadap negara lain, Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali melakukan usaha besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya bahan pangan yang selama ini dipenuhi melalui impor seperti beras, kedelai, gandum, daging, dan susu. Dalam hal produksi biji-bijian, kemampuan produksi ini dapat ditempuh dengan mengembangkan atau menemukan jenis-jenis tanaman pangan yang memberi hasil (*yield*) lebih baik, menemukan beragam tanaman pangan yang bisa ditanam pada kondisi tanah yang berbeda-beda di Indonesia dengan hasil yang optimal, memperluas areal lahan untuk tanaman pangan, dan mengembangkan serta menerapkan metode pertanian yang lebih produktif.

Di samping mencari jenis tanaman dengan *yield* yang lebih baik, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk memperluas lahan pertanian. Dalam hal perluasan lahan pertanian, Indonesia sebenarnya dapat mengolah lagi sebagian lahan kritis yang sekarang luasnya sekitar 77,8 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Lahan kritis ini keadaannya sudah rusak karena kehilangan penutup vegetasinya sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air dan pengendali erosi. Dari seluruh lahan kritis ini, sekitar 47,6 juta hektar tergolong agak kritis, 23,3 juta hektar tergolong kritis dan 6,8 juta hektar sangat kritis. Perlu diketahui bahwa 77,8 juta hektar lahan kritis ini adalah sekitar 40% luas daratan Indonesia. Rehabilitasi kembali lahan kritis ini sekaligus dapat diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan alam dan penyediaan sumber energi terbarukan yang berbasis selulosa.

Dalam pembangunan daerah, untuk mengurangi kesenjangan kemajuan antar daerah dan dalam rangka lebih memeratakan kesejahteraan rakyat, kita perlu mencari dan mengembangkan model pembangunan daerah yang baru, yang cocok untuk daerah yang tanahnya luas, tidak terlalu subur dan jarang penduduknya. Model pembangunan ini hendaknya sekaligus merupakan usaha mengembangkan kualitas modal insani di daerah dan melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian masyarakat setempat adalah kelompok yang pertama-tama diuntungkan oleh kemajuan daerah mereka, mereka tidak menjadi kelompok yang tersisihkan dan tidak menjadi tamu di rumah mereka sendiri.

Bekerjasama

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sangat banyak dan sangat besar. Oleh sebab itu untuk mengatasinya diperlukan usaha oleh banyak pihak yang peduli dan dilakukan bersama-sama. Dalam kegiatan-kegiatan saya sebagai pengusaha dan sebagai penggiat berbagai organisasi kemasyarakatan, saya berjumpa dengan banyak pihak, perorangan dan lembaga, yang punya iktikad baik dan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bertolak dari semangat kejasama inilah Medco Group dan Medco Foundation menjalin kejasama dengan berbagai pihak. Medco Foundation telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk meningkatkan produksi pangan,

khususnya produksi beras di daerah tersebut. Kerjasama juga dijalin dengan Institut Teknologi Bandung dalam penelitian dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, dengan Institut Pertanian Bogor dalam bidang Teknologi Tepat Guna, dengan Universitas Andalas, dalam bidang Teknologi Mekanisasi Pertanian, dengan Yayasan Jati Diri Bangsa untuk mengembangkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Indonesia.

Berbuat

Mencari dan mengembangkan gagasan baru adalah satu hal, sedangkan mengubah gagasan menjadi kegiatan nyata adalah hal lain. Dalam melakukan inovasi, seseorang tidak pernah tahu dengan pasti apakah gagasan baru yang dikembangkannya akan berhasil atau tidak. Keberhasilan atau kegagalan baru akan diketahui sesudah gagasan tersebut diterapkan, atau diubah menjadi sebuah perbuatan. Jadi di sini ada unsur resiko yang harus diperhitungkan dan dipikul.

Dalam mewujudkan gagasan-gagasannya Medco Group telah melakukan berbagai eksperimen dengan berbagai resikonya. Salah satu di antaranya yakni pengembangan energi terbarukan. Misalnya dalam kegiatan kami yang mengandalkan sumber daya alam di Merauke, Papua Selatan, berupa pembuatan *wood pellet* dari bahan baku berupa pohon akasia dan *eucalyptus* yang tergolong sebagai *fast growing species*. Begitu pula dengan pengembangan sumber energi panas bumi. Dua kegiatan terakhir ini menuntut prasyarat berupa ketatnya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan di sekitar lokasi usaha dan juga

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat agar tercapai harmonisasi yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan antara kegiatan-kegiatan kreatif pengembangan energi ini dengan kehidupan masyarakat adat.

Berprinsip

Usaha-usaha nyata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik haruslah dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Di sini yang dimaksud dengan prinsip adalah nilai-nilai kebajikan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan profesional dan kehidupan sosial. Dengan berpegang pada prinsip ini, saya yakin bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan akan membawa dampak yang positif bagi kita sendiri dan bagi lingkungan di sekitar kita.

Pengalaman saya sendiri dalam mengembangkan usaha dengan berpegang pada beberapa prinsip telah saya sampaikan dalam buku *Berbisnis itu (tidak) Mudah*. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, kejujuran, kepercayaan diri, kerjasama, tanggung-jawab, pemberdayaan, kepedulian, dan inovasi. Harus saya akui bahwa berpegang teguh pada prinsip dalam mengembangkan usaha tidaklah mudah, khususnya dalam lingkungan bisnis seperti di Indonesia sekarang ini. Namun demikian, perjuangan yang tidak mudah itulah yang membuat usaha-usaha dan hasil yang dicapai menjadi lebih bermakna.

Memang di Barat, khususnya di Amerika sekarang ini sedang berlangsung debat mengenai 'apakah bisnis itu perlu memerhatikan nilai-nilai moral atau tidak'. Ada kelompok yang menyatakan bahwa dalam berbisnis nilai-nilai moral bukanlah faktor penting; yang penting adalah anda melakukan bisnis secara legal. Selama anda tidak melanggar hukum dalam melakukan bisnis, itu sudah cukup. Dengan tegas saya sampaikan, bahwa saya tidak termasuk kelompok yang berpegang pada azas legal saja. Bagi saya, norma-norma etika dan faktor-faktor moral harus dijadikan salah satu acuan utama dalam melakukan bisnis.

Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom pemenang Hadiah Nobel, menunjukkan bahayanya sikap yang hanya berpegang pada aspek legal saja dalam berbisnis. Dia mengatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat tahun 2008 yang akhirnya melanda dunia, adalah manifestasi dari krisis moral. Mengenai krisis tersebut, Stiglitz menulis dalam '*Free Fall: America, Free Market and the Sinking of World Economy:*'

"Much have been written about the foolishness of the risks that the financial sector undertook, the devastation that the financial institution have brought to the economy, and the fiscal deficit that have resulted; too little has been written about the underlying 'moral deficit' that has been exposed- a deficit that may be larger and even harder to correct. The unrelenting pursuit of profits and the elevation of the pursuit of self-interest may not have created the prosperity that was hoped but they did help created the moral deficit. ... But harder to forgive is the moral depravity – the financial sector's exploitation of the poor and even middle-class Americans. As I noted, financial institutions discovered that there was money

at the bottom of the pyramid and did everythings they could within the law (and many went beyond the law) to move it toward the top.”

Sinyalemen, atau lebih tepatnya, pengakuan serupa pernah dilontarkan secara mengejutkan oleh mantan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Alan Greenspan, yang di ujung karirnya menorehkan catatannya dalam bukunya *The Age of Turbulence*. Sebagaimana Stiglitz, maka, dalam bukunya ini pun Greenspan secara terbuka menuturkan *“The upheaval in world financial market that began in the summer of 2007 was an accident waiting to happen.”* Di negeri yang jadi “kiblat” dari kapitalis dunia, Amerika Serikat, seorang begawan sekelas Greenspan pun sudah mewanti-wanti dan menaruh syak wasangka pada kuatnya motivasi mencari untung semata yang melahirkan *bubble economic* di negerinya ketika tragedi *subprime mortgage* meledak dan melahirkan prahara ekonomi ke penjuru dunia.

Belajar

Dalam memulai dan mengembangkan berbagai usaha, selalu ada kemungkinan bahwa sebagian dari usaha yang dilakukan gagal atau tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu untuk keberlanjutan usaha, kita harus berani belajar dari pengalaman kita sendiri, dari keberhasilan dan dari kegagalan kita sendiri. Di samping itu kita juga harus terbuka dan rajin belajar dari berbagai pihak, dari keberhasilan dan kegagalan orang lain.

Dalam memecahkan persoalan pangan dan energi misalnya, bangsa Indonesia bisa belajar dari pengalaman Brazil. Sesudah

krisis energi yang menerpa dunia tahun 1973, pemerintah Brazil memutuskan untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari fosil khususnya bensin. Pemerintah Brazil mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta melakukan investasi besar-besaran untuk mengembangkan etanol yang berbasis tebu. Setelah menjalankan kebijakannya secara konsisten selama tiga dekade, Brazil sekarang ini penghasil ethanol nomor dua terbesar di dunia, sesudah Amerika Serikat dan menjadi negara eksportir ethanol terbesar di dunia, dan menjadi negara pertama di dunia berhasil membangun "*sustainable biofuels economy*" dan menjadi negara terdepan dalam industry biofuel. Brazil tidak hanya terkemuka dalam produksi energi terbarukan, tetapi juga dalam bidang pangan. Brazil telah berkembang menjadi negara produsen bahan pangan yang tumbuh sangat pesat dua dekade terakhir. Brazil telah menjadi eksportir no 1 di dunia untuk beragam makanan: daging sapi, daging ayam, kedelai, gula, jus jeruk, dan kopi.

Berbagi

Berbagi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan peduli dalam pembangunan bangsa dan negara adalah bagian dari tindakan nyata untuk menjalankan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Dalam berbagi ini, Medco Group telah melakukan berbagai usaha untuk menyebarkan berbagai hasil yang telah dicapainya ke berbagai pihak, di antaranya mencakup pengembangan produk *micro finance services* di wilayah operasi perusahaan, bantuan untuk sekolah, bencana alam hingga

pengembangan padi SRI organik. Semua memiliki "tarikan nafas" yang sama yakni membantu pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial. Kebijakan ini kami sampaikan karena sejak awal berusaha, saya meyakini bahwasanya kita harus berbagi dengan masyarakat, bukan sekadar mencari *profit*. Saya percaya bukan hanya kelompok usaha kami yang berbuat demikian. Nyatanya, memang, dalam bahasa kurun sepuluh tahun terakhir berselang, ikhtiar-ikhtiar serupa disebut dengan terminologi *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang kini telah melahirkan berbagai diskursus dan kajian CSR di kalangan konsultan dan praktisi bisnis di berbagai belahan dunia.

CATATAN PENUTUP

Lawrence E. Harrison pernah menyatakan bahwa '*under development is a state of mind*' (keterbelakangan adalah masalah mentalitas). Walaupun sebuah bangsa dianugerahi dengan banyak sumber daya alam, namun hal itu tidak dengan sendirinya menjamin bahwa bangsa yang bersangkutan menjadi bangsa yang maju kalau tidak memiliki mentalitas yang diperlukan untuk mencapai kemajuan.

Untuk mencapai kemajuan suatu bangsa perlu kerja keras, perlu semangat belajar yang tinggi, perlu disiplin, perlu kegigihan, perlu kejujuran, perlu keberanian, perlu memiliki rasa tanggung jawab, perlu komitmen kuat untuk mencapai cita-cita bersama. Hal ini berlaku untuk kita, bangsa Indonesia sekarang ini. Apabila kita ingin mencapai kemajuan lebih cepat, kita harus membenahi *our*

state of mind; mudah lupa adalah salah satu bentuk kelemahan mental.

Di samping melakukan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di atas untuk melawan lupa, dalam memacu semangat kita untuk mencapai kemajuan bersama, marilah kita mengingatkan diri kita mengenai beberapa hal berikut ini.

Kita perlu ingat bahwa hasil-hasil yang kita capai sekarang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terjadi karena sangat banyak orang yang bersedia memberi dan berkorban. Pemberian dan kebaikan yang telah kita terima dari banyak orang tidak boleh kita anggap sebagai hak kita. Kita hendaknya kembalikan kebaikan itu dengan tindakan nyata yang berdampak positif bagi banyak orang; itu adalah salah satu cara kita untuk berterima kasih dan menjalankan tanggung jawab sosial kita.

Dewasa ini, Indonesia memang menghadapi banyak masalah dan tantangan. Namun kita hendaknya jangan lupa bahwa pengalaman sejarah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mampu memunculkan kekuatan berbagai karakter yang memungkinkan kita mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Saya juga melihat bahwa di sekitar kita, sekarang ini masih sangat banyak orang baik- di kota, di desa, di seluruh penjuru tanah air -yang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat- dalam batas kemampuan mereka masing-masing, dan punya komitmen kuat untuk mengatasi permasalahan bangsa. Di samping itu Indonesia masih memiliki banyak potensi

yang terpendam yang belum dikelola secara cerdas dan bertanggung jawab, termasuk di sini potensi alamnya.

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sekarang ini kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah bangsa yang ber-Ketuhanan dan ber-Perikemanusiaan (dua dari sila dalam Pancasila yang menjadi Dasar Negara kita). Oleh karena itu, dalam menjalankan profesi kita masing-masing, kita perlu menghindari sikap "tujuan menghalalkan cara". Kita perlu dengan seksama mencermati aspek-aspek etis dari tindakan kita, sebab aspek etis inilah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk "di bawah" kita.

Dalam era globalisasi sekarang ini, kita hendaknya jangan naif, seolah-olah pihak-pihak luar yang menawarkan "jasa" kepada Indonesia memberikan jasa tersebut secara cuma-cuma, atau tanpa membawa agenda dan kepentingan mereka sendiri. Jangan mengira "masih ada makan siang gratis". Bangsa Indonesia haruslah meningkatkan kemampuan dan kekuatan untuk menjaga kepentingan, kebebasan dan kedaulatannya sendiri dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia hendaknya secara sungguh-sungguh mengurangi ketergantungannya terhadap pihak-pihak luar. Indonesia harus berusaha keras mengendalikan masa depannya sendiri; sebab, dalam pergaulan dunia yang hampir tanpa batas sekarang ini, kalau suatu bangsa tidak mengendalikan masa depannya sendiri, maka masa depannya akan dikendalikan bangsa lain.

Sudah barang tentu sebagai bagian dari masyarakat global Indonesia hendaknya dapat berkontribusi dalam memajukan peradaban dunia dan kemanusiaan. Namun perlu diingat bahwa Indonesia akan dapat menjalankan peran tersebut secara lebih baik apabila Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan lebih berdaulat. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain yang tenggelam kalau kita tidak bisa berenang.

Untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih berdaulat, kita tidak perlu ragu belajar dari berbagai pihak, termasuk belajar dari bangsa lain. Namun, dalam proses belajar dari luar ini, di samping belajar substansi pengetahuan, kita perlu mencermati konteks dari substansi pengetahuan yang dipelajari khususnya konteks historis dan konteks sosial-budayanya. Hal ini khususnya sangat diperlukan dalam ilmu-ilmu sosial, sebab teori atau konsep yang dikembangkan dalam suatu konteks sejarah dan budaya tertentu, tidak dengan sendirinya bisa diterapkan begitu saja dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda atau dalam kurun waktu yang berbeda. Oleh sebab itu kita, dalam profesi kita masing-masing perlu memperluas dan memperdalam pengetahuan kontekstual kita mengenai bangsa kita sendiri. Dengan dasar pengetahuan kontekstual yang kuat kita akan siap 'mengunyah' pengetahuan atau konsep yang kita pelajari dari luar dan terhindar dari kemungkinan "terkunyah" oleh pengetahuan atau konsep yang berasal dari bangsa lain.

Sekitar 240 juta rakyat Indonesia, semuanya sangat berkepentingan terhadap kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Sayangnya, masih sangat banyak saudara-saudara kita yang

belum merasakan berkah dari kemerdekaan. Diperlukan inovasi dalam bidang kebijakan dan strategi pembangunan agar pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan potensi masyarakat Indonesia dilakukan secara cerdas dan bertanggung jawab, sehingga peningkatan kualitas kehidupan dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan tidak boleh dinikmati hanya oleh mereka yang berkerumun di sekitar pusat-pusat kekuasaan, di pusat maupun di daerah, sementara mereka yang berada di luar pusat-pusat tersebut -seperti saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terdepan dan di daerah pedalaman- makin terpinggirkan. Peningkatan kesejahteraan yang lebih merata merupakan sarat utama dari upaya membangun kembali solidaritas bangsa dan merajut kembali "tenun" ke-Indonesiaan.

Tantangan dan perjuangan untuk membangun Indonesia yang maju, sejahtera dan bermartabat memang masih sangat banyak. Lalu, dari mana kita mulai? Dalam menjawab pertanyaan ini, saya teringat ucapan Presiden John F. Kennedy dalam pidato inagurasinya yang sangat terkenal "*ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country*". Marilah kita bersama-sama, dalam posisi dan peran kita masing-masing berusaha berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, sekecil apapun kontribusi tersebut.

Daftar Rujukan.

Daftar Rujukan

Blanchard, Kenneth dan Norman Vincent Peale. 1988. *The Power of Ethical Management: You Don't Have to Cheat to Win*. London: Heinemann Kingwood.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2008. *Luas dan Penyebaran Lahan Kritis sampai Tahun 2008*. Jakarta.

Greenspan, Alan. 2008. *The Age of Turbulence*. London: Penguin Press.

Harrison, E. Lawrence dan Samuel P. Huntington. 2000. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books

Panigoro, Arifin. 2008. *Berbisnis Itu (Tidak) Mudah; Pengalaman dan Pemikiran Arifin Panigoro*. Jakarta: Medco Foundation.

Panigoro, Arifin. 2008. *Merebut Masa Depan: Menyemai Energi, Pangan, dan Pendidikan*. Risalah disajikan pada Kuliah Umum dalam Rangka Menyambut Hari Sumpah Pemuda di Institut Teknologi Bandung, Bandung, Oktober.

Panigoro, Arifin. 2009. *Merebut Masa Depan: Menyemai Masyarakat Entrepreneurial untuk Kebangkitan Bangsa*. Risalah yang disajikan pada Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Universitas Negeri Padjajaran, Bandung, Mei.

Panigoro, Arifin. 2009. *Indonesia Prospects and Challenges: A Cause for Hope on the Resurrection of Asian Economic Tiger*. Risalah disajikan pada diskusi di Victoria University, Selandia Baru, Oktober.

Stiglitz, Yoseph E. 2010. *Free Fall: America, Free Market, and The Sinking of World Econom*. New York: Norton & Company.

Sumber dari Internet

Artikel non personal, 2007, *Indonesia Diprediksi Krisis Pangan pada 2017*, diakses pada 26 maret 2012 tersedia di <http://www.antaraneews.com/view/?i=1197263788&c=EKB&s>

Artikel non personal, 2011, *Tahun Vivere Pericoloso; Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1964* (online), diakses pada 26 maret 2012 tersedia di <http://jakarta45.wordpress.com/2011/05/29/kenegarawan-tahun-vivere-pericoloso-17-agustus-1964-bung-karno/>

Artikel non personal, 2012, *Ethanol Fuel in Brazil* (online), diakses pada 26 maret 2012 tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil

Human Development Reports, Human Development Index (HDI). 2011. (Online), diakses pada 25 Maret 2012 tersedia di <http://hdr.undp.org/en/statistics>

Jaquot, Jeremy Elton. 2007. *Will Brazil's New Oil Find Slow Progress on Biofuels?*, (Online), diakses pada 25 Maret 2012, tersedia di www.treehugger.com/files/2007/12/will_brazilsnewoil.php

New Energy and Industrial Technology Development (NEDO) (2nd ed). 2006. *CDM Development in Indonesia-Enabling Policies, Institutions and Programmes, Issues and Challenges*, (Online), diakses pada 25 Maret 2012 tersedia di www.nedojakarta.org/nedo/html/docs/cdm.pdf

Omestad, Thomas. 2008. *Brazil Rising Food Power in a Hungry World*, (online), diakses pada 25 Maret 2012 tersedia di www.usnews.com/articles/news/world/2008/05/08

USDA Baseline Projections. February, 2005. (Online), diakses pada 25 maret 2012 tersedia di www.ers.usda.gov/publications.

